# RENCANA KERJA (RENJA)

# KECAMATAN PASIR SAKTI

# TAHUN 2025




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KECAMATAN PASIR SAKTI**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasir Sakti pada Tahun 2025.

Pasir Sakti, 2024

Plt. CAMAT PASIR SAKTI

**R. PATAH, S.E**

NIP. 19810720 201503 1 002

# DAFTAR ISI


Halaman Judul ..... i
Kata Pengantar ..... ii
Daftar Isi ..... iii
Daftar Tabel ..... iv

Bab I Pendahuluan ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Landasan Hukum ..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4. Sistematika Penulisan ..... 5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ..... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ..... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..... 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ..... 10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 10
2.5. Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ..... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan ..... 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi ..... 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD ..... 14
3.3. Program dan Kegiatan ..... 15
Bab IV Penutup ..... 20

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasir Sakti

Tabel 3 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Pasir Sakti, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Pasir Sakti merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Pasir Sakti, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Pasir Sakti Nomor : 050/12/SK/19-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Pasir Sakti adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai

penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasir Sakti untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasir Sakti (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Pasir Sakti sebesar Rp. 1.273.146.631,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.190.505.322,00 atau mencapai 93,51%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Pasir Sakti dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasir Sakti tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Pasir Sakti, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Pasir Sakti tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pasir Sakti sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

**Tabel 1**

**Realisasi Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2023**

| KODE PROGRAM/ KEGIATAN | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH KURANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JUMLAH | % |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 1.268.981.531 | 1.186.655.322 | 82.326.209 | 93,51% |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 1.247.911.531 | 1.165.585.322 | 82.326.209 | 93,40% |

| KODE PROGRAM/ KEGIATAN | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH KURANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JUMLAH | % |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.330.000** | **2.330.000** | **0** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.330.000 | 2.330.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.102.866.067** | **1.020.829.274** | **82.036.793** | **92,56%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.038.616.067 | 956.579.274 | 82.036.793 | 92% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 37.710.000 | 37.710.000 | 0 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 26.540.000 | 26.540.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.350.000** | **7.350.000** | **0** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **20.832.064** | **20.735.600** | **96.464** | **99,54%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.480.000 | 2.480.000 | 0 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.912.064 | 6.815.600 | 96.464 | 98,60% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.440.000 | 3.440.000 | 0 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **98.983.400** | **98.790.448** | **192.952** | **99,81%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.656.000 | 10.463.048 | 192.952 | 98,19% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 88.327.400 | 88.327.400 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.550.000** | **15.550.000** | **0** | **100%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **14.550.000** | **14.550.000** | **0** | **100%** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **14.550.000** | **14.550.000** | **0** | **100%** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 14.550.000 | 14.550.000 | 0 | 100% |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.520.000** | **6.520.000** | **0** | **100%** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **6.520.000** | **6.520.000** | **0** | **100%** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6.520.000 | 6.520.000 | 0 | 100% |
| **Jumlah** | | | | | | **1.268.981.531** | **1.186.655.322** | **82.326.209** | **93,51%** |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasir Sakti

Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/ impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD

Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasir Sakti

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (% ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100% | 100% | 100% | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 65 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 65 | 76 | 77 | | | | 100% | 100% | 100% | | | |
| 3 | Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100% | 100% | 100% | | | |

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.9
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Pasir Sakti antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pasir Sakti dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Pasir Sakti sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

### 3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

### 3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

### 3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.

6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *"Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

#### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Pasir Sakti

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (% )

2. Meningkatkan kualitas layanan publik
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
   Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

**B Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pasir Sakti dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
   Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (% )
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
   Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

### 3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Pasir Sakti adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Pasir Sakti dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawa, Belanja Barang

dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.613.997.755,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pasir Sakti adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.598.155.866,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 14.896.000,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Pasir Sakti dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

# Tabel 3

## Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : KECAMATAN PASIR SAKTI

| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2025 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **1,598,155,866** | | | **100%** | **1,912,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Dokumen** | **7,847,514** | **DAU** | | **2 Dokumen** | **10,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Dokumen | 7,847,514 | DAU | | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **4 Dokumen** | **1,226,570,734** | **DAU** | | **4 Dokumen** | **1,515,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pasir Sakti | 14 Orang | 1,146,749,324 | DAU | | 14 Orang | 1,400,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Dokumen | 13,021,410 | DAU | | 1 Dokumen | 35,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Dokumen | 66,800,000 | DAU | | 1 Dokumen | 80,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **8,011,410** | **DAU** | | **12 Laporan** | **10,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 8,011,410 | DAU | | 12 Laporan | 10,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **87,213,920** | **DAU** | | **12 Laporan** | **106,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 10,107,771 | DAU | | 1 Paket | 14,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 27,026,149 | DAU | | 1 Paket | 40,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 13,050,000 | DAU | | 1 Paket | 12,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 37,030,000 | DAU | | 12 Laporan | 40,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **1 Paket** | **15,386,931** | **DAU** | | **1 Paket** | **27,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Unit | 15,386,931 | DAU | | 2 Unit | 27,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **172,345,357** | **DAU** | | **12 Laporan** | **184,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 12,232,800 | DAU | | 12 Laporan | 14,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 160,112,557 | DAU | | 12 Laporan | 170,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Jenis** | **80,780,000** | **DAU** | | **2 Jenis** | **60,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kecamatan Pasir Sakti | 3 Unit | 43,130,000 | DAU | | 3 Unit | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Pasir Sakti | 13 Unit | 6,370,000 | DAU | | 13 Unit | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Pasir Sakti | 3 Unit | 31,280,000 | DAU | | 3 Unit | 40,000,000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (% )** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **6,332,820** | **DAU** | | **100%** | **10,000,000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Dokumen** | **6,332,820** | **DAU** | | **2 Dokumen** | **10,000,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Dokumen | 6,332,820 | DAU | | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **14,896,000** | **DAU** | | **100%** | **60,000,000** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **4 Laporan** | **14,896,000** | **DAU** | | **3 Laporan** | **60,000,000** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | Kecamatan Pasir Sakti | 4 Laporan | 14,896,000 | DAU | | 2 Laporan | 60,000,000 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **10,000,000** | **DAU** | | **100%** | **20,000,000** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Laporan** | **10,000,000** | **DAU** | | **2 Laporan** | **20,000,000** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Laporan | 10,000,000 | DAU | | 2 Laporan | 20,000,000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1,629,384,686** | | | | **2,002,000,000** |

Pasir Sakti, 2024

**Plt. CAMAT PASIR SAKTI**

**R. PATAH, S.E**

NIP. 19810720 201503 1 002

# BAB IV
# P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasir Sakti tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pasir Sakti. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasir Sakti Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Pasir Sakti Tahun 2021-2026

Pasir Sakti, 2024
Plt. CAMAT PASIR SAKTI

**R. PATAH, S.E**
NIP. 19810720 201503 1 002

# Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : KECAMATAN PASIR SAKTI

| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2025 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **1.598.155.866** | | | **100%** | **1.912.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Dokumen** | **7.847.514** | **DAU** | | **2 Dokumen** | **10.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Dokumen | 7.847.514 | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **4 Dokumen** | **1.226.570.734** | **DAU** | | **4 Dokumen** | **1.515.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Pasir Sakti | 14 Orang | 1.146.749.324 | DAU | | 14 Orang | 1.400.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Dokumen | 13.021.410 | DAU | | 1 Dokumen | 35.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Dokumen | 66.800.000 | DAU | | 1 Dokumen | 80.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **8.011.410** | **DAU** | | **12 Laporan** | **10.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 8.011.410 | DAU | | 12 Laporan | 10.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **87.213.920** | **DAU** | | **12 Laporan** | **106.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 10.107.771 | DAU | | 1 Paket | 14.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 27.026.149 | DAU | | 1 Paket | 40.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Paket | 13.050.000 | DAU | | 1 Paket | 12.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 37.030.000 | DAU | | 12 Laporan | 40.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **1 Paket** | **15.386.931** | **DAU** | | **1 Paket** | **27.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 1 Unit | 15.386.931 | DAU | | 2 Unit | 27.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **12 Laporan** | **172.345.357** | **DAU** | | **12 Laporan** | **184.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 12.232.800 | DAU | | 12 Laporan | 14.000.000 |

| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2025 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kecamatan Pasir Sakti | 12 Laporan | 160.112.557 | DAU | | 12 Laporan | 170.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dipelihara** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Jenis** | **80.780.000** | **DAU** | | **2 Jenis** | **60.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kecamatan Pasir Sakti | 3 Unit | 43.130.000 | DAU | | 3 Unit | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Pasir Sakti | 13 Unit | 6.370.000 | DAU | | 13 Unit | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Pasir Sakti | 3 Unit | 31.280.000 | DAU | | 3 Unit | 40.000.000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu (% )** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **6.332.820** | **DAU** | | **100%** | **10.000.000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Dokumen** | **6.332.820** | **DAU** | | **2 Dokumen** | **10.000.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Dokumen | 6.332.820 | DAU | | 2 Dokumen | 10.000.000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **14.896.000** | **DAU** | | **100%** | **60.000.000** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **4 Laporan** | **14.896.000** | **DAU** | | **3 Laporan** | **60.000.000** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | Kecamatan Pasir Sakti | 4 Laporan | 14.896.000 | DAU | | 2 Laporan | 60.000.000 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **100%** | **10.000.000** | **DAU** | | **100%** | **20.000.000** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Kecamatan Pasir Sakti** | **2 Laporan** | **10.000.000** | **DAU** | | **2 Laporan** | **20.000.000** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kecamatan Pasir Sakti | 2 Laporan | 10.000.000 | DAU | | 2 Laporan | 20.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.629.384.686** | | | | **2.002.000.000** |

Pasir Sakti, 2024

**Plt. CAMAT PASIR SAKTI**

**R. PATAH, S.E**

NIP. 19810720 201503 1 002

| KODE PROGRAM/KEGIATAN | | | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH KURANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | JUMLAH | % |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.290.717.024,00** | **1.207.596.848,00** | **85.872.638,00** | **93,56%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **2.720.000,00** | **2.720.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.103.936.624,00** | **1.023.440.579,00** | **80.496.045,00** | **92,71%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.019.386.624,00 | 950.220.579,00 | 69.166.045,00 | 93,21% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 55.260.000,00 | 46.100.000,00 | 9.160.000,00 | 83,42% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 29.290.000,00 | 27.120.000,00 | 2.170.000,00 | 92,59% |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.500.000,00** | **6.300.000,00** | **1.200.000,00** | **84,00%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 7.500.000,00 | 6.300.000,00 | 1.200.000,00 | 84,00% |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **38.250.500,00** | **38.250.500,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.123.000,00 | 3.123.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.927.500,00 | 10.927.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.745.500,00** | **5.700.000,00** | **2.797.962,00** | **99,21%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.745.500,00 | 5.700.000,00 | 45.500,00 | 99,21% |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **102.680.400,00** | **101.304.169,00** | **1.376.231,00** | **98,66%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.600.000,00 | 11.790.769,00 | 809.231,00 | 93,58% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.080.400,00 | 89.513.400,00 | 567.000,00 | 99,37% |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **29.884.000,00** | **29.881.600,00** | **2.400,00** | **99,99%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | 24.244.000,00 | 24.241.600,00 | 2.400,00 | 99,99% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.640.000,00 | 5.640.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **14.700.000,00** | **14.700.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **14.700.000,00** | **14.700.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **17.650.000,00** | **17.650.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **7** | **01** | **04** | **2,01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **17.650.000,00** | **17.650.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | 17.650.000,00 | 17.650.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | | **JUMLAH TOTAL** | **1.323.067.024,00** | **1.239.946.848,00** | **83.120.176,00** | **93,72%** |

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (% ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100% | 100% | | | | |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 65 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 65 | 76 | | | | | 100% | 100% | | | | |
| 3 | Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100% | 100% | | | | |

# RENCANA KERJA (RENJA)

# KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

# TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja ( Renja-SKPD) Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marga Sekampung pada Tahun 2026.

Marga Sekampung,
2025

Camat Marga Sekampung

MARDIRONO,S.Sos
NIP. 19691201 199003 1 006

Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI


Halaman Judul ..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar Isi ..... iii

Daftar Tabel ..... iv

Bab I Pendahuluan ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4. Sistematika Penulisan ..... 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..... 8

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ..... 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 10

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ..... 11

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan ..... 12

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi ..... 12

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD ..... 14

3.3. Program dan Kegiatan ..... 15

Bab IV Penutup ..... 20


Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Sekampung

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

Dipindai dengan CamScanner

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Marga Sekampung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Marga Sekampung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Marga Sekampung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2026 dan Renstra Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Marga Sekampung adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2026 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marga Sekampung untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Dipindai dengan CamScanner

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Dipindai dengan CamScanner

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Marga Sekampung (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Marga Sekampung sebesar Rp. 1.948.502.085,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.852.924.463,00 atau mencapai 95,05%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Marga Sekampung dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Sekampung tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Marga Sekampung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Marga Sekampung tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Sekampung sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

**Tabel I**

**Realisasi Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2024**

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH KURANG | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | % |
| 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| KECAMATAN | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.870.816.594** | **1.799.044.463** | **71.772.131** | **96,16%** |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.847.514** | **3.275.000** | **4.572.514** | **41,73%** |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.847.514 | 3.275.000 | 4.572.514 | 41,73% |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.561.014.160** | **1.530.594.463** | **30.419.697** | **98,05%** |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.507.222.830 | 1.477.674.463 | 29.548.367 | 98,04% |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.800.000 | 4.350.000 | 450.000 | 90,63% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 48.991.330 | 48.570.000 | 421.330 | 99,14% |
| **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **7.500.000** | **7.500.000** | - | **100,00%** |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.500.000 | 7.500.000 | - | 100,00% |
| **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **9.000.000** | **8.550.000** | **450.000** | **95,00%** |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 9.000.000 | 8.550.000 | 450.000 | 95,00% |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **81.770.355** | **67.419.800** | **14.350.555** | **82,45%** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.293.480 | 3.446.000 | 847.480 | 80,26% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.679.195 | 15.062.000 | 1.617.195 | 90,30% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.397.680 | 11.951.800 | 445.880 | 96,40% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 48.400.000 | 36.960.000 | 11.440.000 | 76,36% |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **30.321.426** | **27.850.000** | **2.471.426** | **91,85%** |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.321.426 | 27.850.000 | 2.471.426 | 91,85% |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **114.665.143** | **114.169.500** | **495.643** | **99,57%** |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.425.000 | 15.367.500 | 57.500 | 99,63% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 99.240.143 | 98.802.000 | 438.143 | 99,56% |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **58.697.996** | **39.685.700** | 19.012.296 | 67,61% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.770.000 | 27.783.700 | 16.986.300 | 62,06% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.750.000 | 6.800.000 | 950.000 | 87,74% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.177.996 | 5.102.000 | 1.075.996 | |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **2.340.036** | **2.135.000** | **205.036** | **91,24%** |
| **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **2.340.036** | **2.135.000** | **205.036** | **91,24%** |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 2.340.036 | 2.135.000 | 205.036 | 91,24% |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **75.345.455** | **51.745.000** | **23.600.455** | **68,68%** |
| **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **75.345.455** | **51.745.000** | **23.600.455** | **68,68%** |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 75.345.455 | 51.745.000 | 23.600.455 | 68,68% |
| | | | | |
| JUMLAH | **1.948.502.085** | **1.852.924.463** | **95.577.622** | **95,09%** |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Sekampung

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung dapat dicapai bila Indeks Kepuasan

Dipindai dengan CamScanner

Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Sekampung

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 65 | 65 | 76 | 77 | 78 | 79 | 65 | 76 | 77 | 78 | 100% | 117% | 101% | 101% | |
| 2 | pelayanan perizinan kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1001% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Rasio Angka Kriminalitas | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,355 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,355 | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Marga Sekampung antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.

Dipindai dengan CamScanner

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Marga Sekampung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Marga Sekampung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

Dipindai dengan CamScanner

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

### 3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2026 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Dipindai dengan CamScanner

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### 3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

### 3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sesuai dengan visi "LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU

Dipindai dengan CamScanner

INDONESIA EMAS" Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

**A Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Marga Sekampung

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 :

Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

**B Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Marga Sekampung dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
   Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatanMeningkatkan kualitas layanan publik
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa
   Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

**3.3 Program dan kegiatan**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Marga Sekampung adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Marga Sekampung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dipindai dengan CamScanner

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Dipindai dengan CamScanner

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 1.725.175.663,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Marga Sekampung adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.884.093.631,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.280.000,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 0,-
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 20.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 untuk Kecamatan Marga Sekampung dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

**Tabel 3**
**Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026**

| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2026 | | | | Catatan Penting | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | Marga Sekampung | 100% | **1.867.023.667,00** | DAU | | 100% | 1.921.729.856,00 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | | **Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Marga Sekampung | 100% | **2.643.379** | DAU | | 100% | 2.843.300 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Marga Sekampung | 2 Dokumen | 2.643.379 | DAU | | 2 Dokumen | 2.843.300 |
| **7** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | persentase administrasi keuangan perangkat daerah | Marga Sekampung | 100% | **1.711.214.499** | DAU | | 100% | 1.731.213.500 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Marga Sekampung | 11 Orang | 1.663.051.999 | DAU | | 11 Orang | 1.683.051.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Marga Sekampung | 1 dokumen | 1.362.500 | DAU | | 1 Dokumen | 1.362.300 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Marga Sekampung | 1 dokumen | 46.800.000 | DAU | | 1 Dokumen | 46.800.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2,03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun | Marga Sekampung | 100% | **4.800.000** | DAU | | 100% | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Marga Sekampung | 12 laporan | 4.800.000 | DAU | | 12 laporan | 6.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase administrasi kepegawaian yang tertib | Marga Sekampung | 100% | - | DAU | | 100% | - |

Page 1

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **01** | **2,05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase administrasi kepegawaian yang tertib | Marga Sekampung | 100% | - | DAU | | 100% | - |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Marga Sekampung | 1 paket | - | DAU | | 1 paket | - |
| **7** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah | Marga Sekampung | 100% | **12.811.975** | DAU | | 100% | **24.849.242** |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Marga Sekampung | 1 paket | 800.000 | DAU | | 1 paket | 12.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Marga Sekampung | 1 paket | 997.500 | DAU | | 1 paket | 1.234.787 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Marga Sekampung | 1 paket | 4.214.475 | DAU | | 1 paket | 4.314.479 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Marga Sekampung | 12 laporan | 6.800.000 | DAU | | 12 laporan | 7.100.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah | Marga Sekampung | 100% | **6.882.000** | DAU | | 100% | **6.882.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Marga Sekampung | 1 unit | 6.882.000 | DAU | | 1 unit | 6.882.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Marga Sekampung | 100% | **100.997.200** | DAU | | 100% | **102.997.200** |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Marga Sekampung | 12 laporan | 10.997.200 | DAU | | 12 laporan | 12.997.200 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Marga Sekampung | 12 laporan | 90.000.000 | DAU | | 12 laporan | 90.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | Marga Sekampung | 100% | **27.674.614** | DAU | | 100% | **46.944.614** |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Marga Sekampung | 3 Unit | 24.474.578 | DAU | | 3 Unit | 34.474.578 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Marga Sekampung | 6Unit | 720.000 | DAU | | 6Unit | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Marga Sekampung | 1 unit | 2.470.036 | DAU | | 1 unit | 2.470.036 |

Page 2

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Marga Sekampung | 100% | **19.000.000** | DAU | | 100% | **19.000.000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan | Marga Sekampung | 100% | **19.000.000** | DAU | | 100% | **19.000.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Marga Sekampung | 4 dokumen | 19.000.000 | DAU | | 4 dokumen | 19.000.000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan) | Marga Sekampung | 100% | **11.752.486** | DAU | | 100% | **11.822.486** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Marga Sekampung | 100% | 11.752.486 | DAU | | 100% | 11.822.486 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Marga Sekampung | 2 laporan | 11.752.486 | DAU | | 2 laporan | 11.822.486 |
| **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Marga Sekampung | 100% | **20.000.000** | DAU | | 100% | **20.000.000** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa | Marga Sekampung | 100% | 20.000.000 | DAU | | 100% | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Marga Sekampung | 8 laporan | 20.000.000 | DAU | | 8 laporan | 20.000.000 |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.917.776.153** | | | | 1.972.552.343 |

Page 3

Marga Sekampung, Mei 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG

NOGOIYONO,S.Sos

NIP. 19691201 199003 1 006

Dipindai dengan CamScanner

# BAB IV
# P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Sekampung tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Marga Sekampung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marga Sekampung Tahun 2026 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Marga Sekampung Tahun 2025-2029

Marga Sekampung,
2025

Camat Marga Sekampung

MARDIYONO,S.Sos
NIP. 196912011990031006

Dipindai dengan CamScanner